

Manajemen Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda

Riduan¹, Ety Nurbayani², Muthia Umi Setyoningrum^{3*}

^{1,2,3*}UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Abstract

This study is motivated by the importance of inclusive education to ensure that every child, including children with special needs, has the same rights in education. SMP Negeri 7 Samarinda has been designated as an inclusive school since 2011 and in 2023 will become one of the inclusion coordinators in Samarinda City. This study aims to examine the management of inclusive education at SMP Negeri 7 Samarinda. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use the Miles, Huberman and Saldana models, namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. Data validity techniques use source triangulation and technique triangulation. The results of this study indicate that SMP Negeri 7 Samarinda implements inclusive education through various aspects of management. At the planning stage, schools conduct assessments of students with special needs to identify students with special needs, plan individual support, and provide opportunities for students to participate in extracurricular activities and competitions. At the organizing stage, the division of tasks between teachers and the inclusion team is carried out clearly and the grouping of tasks based on function reflects the management of education personnel. At the implementation stage, teacher motivation is increased through training in the context of education personnel management, while effective communication between schools shows the implementation of supportive communication. At the monitoring stage, there are performance standards and monitoring mechanisms in the curriculum and education personnel management, with periodic evaluations involving joint reflection, indicating sustainable environmental management and performance. The implications of this study are the need to strengthen teacher capacity through inclusive leadership, as well as continuous evaluation. Recommendations for schools include increasing training, establishing partnerships, improving inclusive facilities, and disseminating good practices to other schools.

Keywords: Inclusive Education, Educational Management, Inclusive School

Abstrak

Studi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pendidikan inklusif yang menjamin bahwa setiap anak berhak memperoleh layanan yang sama dalam Pendidikan termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. SMP Negeri 7 Samarinda ditunjuk sebagai sekolah inklusif sejak tahun 2011 dan pada tahun 2023 akan menjadi salah satu koordinator inklusi di Kota Samarinda. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji manajemen pendidikan inklusif di SMP Negeri 7 Samarinda. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Teknik analisis data melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Triangulasi sumber dan triangulasi Teknik digunakan dalam mencari data yang sah/ valid. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 7 Samarinda melaksanakan pendidikan inklusif melalui berbagai aspek manajemen. Pada tahap perencanaan, sekolah melakukan asesmen siswa berkebutuhan khusus untuk mengidentifikasi siswa berkebutuhan khusus, merencanakan dukungan individual, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan perlombaan. Pada tahap pengorganisasian, pembagian tugas antara guru dan tim inklusi dilakukan dengan jelas dan pengelompokan tugas berdasarkan fungsi mencerminkan pengelolaan tenaga kependidikan. Pada tahap pelaksanaan, motivasi guru ditingkatkan melalui pelatihan dalam konteks manajemen tenaga kependidikan, sedangkan komunikasi efektif antar sekolah menunjukkan terlaksananya komunikasi yang mendukung. Pada tahap pemantauan, terdapat standar kinerja dan mekanisme pemantauan dalam kurikulum dan manajemen tenaga kependidikan, dengan evaluasi berkala yang melibatkan refleksi bersama, menunjukkan pengelolaan lingkungan dan kinerja yang berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas guru melalui kepemimpinan yang inklusif, serta evaluasi berkelanjutan. Rekomendasi bagi sekolah yaitu meningkatkan pelatihan, menjalin kemitraan, memperbaiki sarana inklusif, dan mendiseminasikan praktik baik ke sekolah lain.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusi, Manajemen Pendidikan, Sekolah Inklusi

* Correspondence Address:

Email Address: muthiyumie@gmail.com

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah upaya penting yang bertujuan mengembangkan kecerdasan intelektual, moral, keterampilan sosial, dan pengelolaan emosi anak-anak agar mampu berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial di masyarakat (Bahri, 2022). Pendidikan juga memegang peranan kunci dalam kemajuan suatu negara, sebagaimana terlihat dari negara-negara maju yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, meskipun pendidikan terus berkembang, masih terdapat berbagai tantangan, khususnya dalam hal pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Tantangan ini hanya dapat diatasi dengan kerjasama antara seluruh elemen pendidikan, termasuk masyarakat, guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa (Tamy Deby Ivancha et al., 2024).

Setiap individu, baik anak yang memiliki bakat atau kecerdasan istimewa dan anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki hak dalam memperoleh akses Pendidikan. Hal ini dijamin oleh Pasal 32 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 yang menegaskan pentingnya pendidikan khusus bagi peserta didik yang menghadapi kesulitan belajar karena kelainan mental, emosional, fisik, maupun sosial (Isna Yunita et al., 2019). Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Atau Bakat Istimewa Tahun 2009 mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi sebagai upaya memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh siswa, baik berkebutuhan khusus maupun yang memiliki bakat istimewa (Alfikri et al., 2022).

Namun, pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala. Data menunjukkan bahwa di beberapa daerah, anak berkebutuhan khusus masih mengalami hambatan akses pendidikan akibat stigma atau kebijakan lokal yang diskriminatif. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia menerapkan program pendidikan inklusif sebagai solusi

untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa, termasuk dengan mengubah sekolah reguler menjadi sekolah inklusi.

Manajemen yang efektif di sekolah inklusi merupakan hal penting dalam mencegah diskriminasi dan mendukung keberhasilan pendidikan inklusi. Untuk memastikan bahwa siswa berkebutuhan khusus yang tidak dapat bersekolah di SLB tetap memperoleh layanan pendidikan yang memadai, pemerintah menerapkan program pendidikan inklusi dengan mengubah sekolah reguler menjadi sekolah inklusi (Widodo et al., 2020). Program ini didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003, yang menginstruksikan setiap kota/kabupaten untuk mengembangkan minimal empat sekolah inklusi di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK (Mulyah & Khoiri, 2023).

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), hingga September 2023, terdapat 44.477 sekolah reguler di seluruh Indonesia yang telah menerapkan program inklusi. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2021 dengan 35.802 sekolah dan tahun 2022 dengan 40.928 sekolah (Nurwahyuliningsih & Ramdani, 2024). Dalam dialog interaktif "Suara Disabilitas" di RRI Pro Satu Samarinda pada 7 Agustus 2019, Kabid PPA Noer Adenany menyampaikan bahwa berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) dari Kemendagri tahun 2018, jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kalimantan Timur mencapai 3.230 anak (Rakhmatyah et al., 2023). Sementara itu, pada 8 Mei 2024, Kepala UPTD PLDPI Samarinda, Moehammad Goufur, menyatakan bahwa terdapat sekitar 175 sekolah inklusi di Samarinda, terdiri dari 113 sekolah negeri dan 62 sekolah swasta, dengan jumlah siswa penyandang disabilitas sekitar 840 anak yang tersebar di jenjang PAUD, SD, hingga SMP (Ashari, 2024).

SMP Negeri 7 Samarinda adalah salah satu sekolah yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Samarinda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah inklusi sejak tahun 2011 dan kini berperan sebagai koordinator sekolah inklusi jenjang SMP di Samarinda. Sekolah ini menerapkan model kelas inklusi penuh, di mana siswa berkebutuhan khusus berada dalam satu kelas dengan siswa reguler. Dengan berbagai jenis kebutuhan khusus seperti autisme, tunadaksa, slow learner, tunarungu dan lainnya. Dengan keadaan peserta didik yang beraneka ragam tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda terkhususnya dalam hal manajemen pendidikan inklusi.

B. Tinjauan Pustaka

Manajemen Pendidikan Inklusi ialah proses pengelolaan layanan pendidikan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah terdekat di dalam kelas reguler bersama teman sebayanya. Manajemen ini melibatkan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang mencakup:

1. Perencanaan pendidikan melibatkan perancangan program kerja untuk mencapai tujuan pendidikan (Sherly et al., 2020). Perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen sebelum melakukan kegiatan untuk menapai tujuan (Ridha & Setyoningrum, 2022) Adapun tahapan perencanaan yang digunakan menurut Handoko yaitu menetapkan tujuan, menjelaskan keadaan, mengidentifikasi segala peluang dan hambatan, serta menetapkan rencana guna mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian mencakup pengelolaan tenaga pendidik dan staf pendidikan melalui struktur yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab (Sherly et

al., 2020). Adapun tahapan pengorganisasian yang digunakan menurut Stoner yaitu merinci tugas yang akan dilakukan, membagi tugas, pengelompokan tugas, menetapkan mekanisme organisasi, serta memantau aktivitas struktur organisasi.

3. Pelaksanaan adalah implementasi nyata dari perencanaan dan pengorganisasian dalam lingkungan pendidikan, di mana pendidik dan staf menjalankan tugas sesuai bidangnya (Sherly et al., 2020). Adapun tahapan pelaksanaan yang digunakan menurut Handoko yaitu memotivasi bawahan dan komunikasi yang baik.
4. Pengawasan bertujuan untuk menilai seluruh kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, dengan tujuan perbaikan di masa mendatang (Sherly et al., 2020). Adapun tahapan pengawasan yang digunakan menurut Stoner yaitu menetapkan standar kinerja, memantau kinerja, menilai kinerja, dan mengevaluasi.

Manajemen sekolah inklusif pada dasarnya sama dengan manajemen sekolah umum, yang meliputi aspek berikut:

1. Manajemen Peserta Didik

Manajemen peserta didik meliputi: (a) penerimaan, yang mencakup identifikasi, penilaian, dan penempatan (b) pelaksanaan program penyuluhan, bimbingan dan pelatihan, dan (c) pengelolaan peserta didik.

2. Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum di sekolah inklusif merupakan kurikulum nasional yang dimodifikasi agar sesuai dengan karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Ini mencakup penjabaran kalender pendidikan, penyusunan jadwal pelajaran, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, pelaksanaan penilaian, kenaikan kelas, penyusunan laporan kemajuan belajar, serta kegiatan remedial dan pengayaan.

3. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Manajemen tenaga kependidikan dan pendidik mencakup pengelolaan sumber daya manusia dalam kinerja pelaksanaan sekolah inklusif. Pendidik dan tenaga kependidikan berperan dalam kegiatan belajar-mengajar (KBM), pelatihan, penelitian, intervensi, serta penyediaan layanan teknis.

4. Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan evaluasi kebutuhan fasilitas, guna mendukung keberhasilan pembelajaran inklusif secara optimal.

5. Manajemen Keuangan

Dalam manajemen keuangan di sekolah inklusif, selain alokasi dana reguler, diperlukan alokasi dana khusus dalam kebutuhan identifikasi/asesmen, pengembangan kurikulum, pengadaan media dan metode pembelajaran, honor bagi tenaga pendidik, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan masyarakat, serta proses kegiatan pembelajaran (Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

6. Manajemen Lingkungan

Pendidikan inklusif adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan orang tua. Keterlibatan seluruh pihak dalam setiap aspek manajemen: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, tindak lanjut, dan pendanaan pendidikan inklusif harus dioptimalkan melalui perumusan mekanisme manajerial yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat.

C. Metode

Penelitian ini berjenis deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Sugiyono (2020), ciri-ciri penelitian kualitatif deskriptif meliputi penggunaan kata-kata atau gambar sebagai representasi data, bukan angka. Penelitian ini berfokus pada interaksi antara individu dalam suatu komunitas, pelaksanaan kegiatan, serta perkembangan gejala atau fenomena yang muncul.

1. Data dan Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Dimana sumber data primer dikumpulkan langsung dari pihak terkait seperti kepala sekolah dan koordinator program inklusi. Sedangkan sumber data sekunder secara tidak langsung didapatkan melalui dokumen atau arsip.

2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, beberapa teknik digunakan untuk mengumpulkan data, di antaranya:

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data melalui pengamatan sistematis, di mana peneliti mencatat fenomena-fenomena yang diteliti (Hardani et al., 2020). Peneliti menggunakan metode observasi terstruktur dan non-partisipatif. Meskipun peneliti hadir di lokasi penelitian, keterlibatan peneliti dalam aktivitas yang diamati bersifat tidak langsung. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana pendidikan inklusif dikelola di SMP Negeri 7 Samarinda. Fokus pengamatan meliputi sarana dan prasarana sekolah, serta implementasi manajemen dan program pendidikan inklusif.

b. Wawancara

Data dikumpulkan dari dialog lisan/ tanya jawab yang terarah. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara untuk mengarahkan proses tanya jawab (Hardani et al., 2020). Kepala sekolah dan koordinator inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda menjadi informan utama dalam wawancara ini. Peneliti telah menyusun prosedur wawancara yang fleksibel, sehingga pertanyaan dapat dimodifikasi sesuai dengan informasi yang diperlukan. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya memperoleh data terkait manajemen pendidikan inklusif, meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di SMP Negeri 7 Samarinda.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan tertulis atau dokumen. Informasi yang diperoleh melalui dokumentasi ini berasal dari dokumen yang telah ada sebelumnya, sehingga bersifat sekunder. Data dokumentasi memanfaatkan informasi yang sudah tersimpan dalam bentuk tertulis (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data terkait manajemen pendidikan inklusif di SMP Negeri 7 Samarinda, mencakup struktur organisasi inklusif, brosur penerimaan peserta didik baru (PPDB), data visi dan misi, data siswa berkebutuhan khusus, surat keputusan (SK) sekolah inklusif, serta dokumentasi pendukung lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menelaah informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain, dengan tujuan memahaminya dan menyampaikan hasilnya kepada pihak terkait (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik selama

proses pengumpulan data maupun setelah data terkumpul. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana mengemukakan bahwa analisis data meliputi tiga tahapan simultan: kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014):

a. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data adalah proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan pengabstraksian informasi dari catatan lapangan, transkrip wawancara, serta dokumen. Proses ini membantu memperkuat dan menyaring data sehingga menjadi lebih relevan dan fokus, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan temuan penting.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah proses kondensasi, data disajikan secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan melalui narasi teks yang terstruktur. Penyajian ini membantu peneliti dan pembaca memahami situasi yang diteliti secara lebih jelas, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang ditarik dapat berubah jika bukti tambahan menunjukkan hal yang berbeda. Validitas kesimpulan akan diperkuat jika data yang diperoleh terus-menerus konsisten dan diverifikasi melalui pengujian lapangan atau analisis lebih lanjut. Kesimpulan yang valid harus didukung oleh data yang kuat dan dapat diandalkan.

4. Teknik Keabsahan Data

Untuk diperoleh data yang valid dan sah maka peneliti melakukan ketekunan dalam menggali dan merefleksikan data secara lebih komprehensif. Selain itu dilakukan triangulasi, yaitu dengan memverifikasi atau membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai sumber atau metode.

D. Temuan

Informasi yang akurat mengenai manajemen pendidikan inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Manajemen pendidikan inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda pada perencanaan yang mencakup aspek menetapkan tujuan, menjelaskan keadaan, mengidentifikasi segala peluang, kekuatan dan hambatan, dan menetapkan rencana. SMP Negeri 7 Samarinda menetapkan tujuan pendidikan inklusi berdasarkan regulasi pemerintah dan prinsip kesetaraan. Tujuan utama program ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap siswa dapat berkembang sesuai potensinya tanpa diskriminasi. Dari aspek keadaan, SMP Negeri 7 Samarinda melakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan spesifik setiap anak berkebutuhan khusus (ABK). Siswa yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah umum akan diterima, sementara yang membutuhkan penanganan khusus mungkin akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Sekolah menerima berbagai jenis ABK, kecuali tunanetra karena keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar.

Dari aspek kemudahan dan hambatan, program inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda mendapatkan dukungan dari guru, orang tua siswa, dan dinas pendidikan. Yang menjadi hambatannya ialah keterbatasan fasilitas khusus dan belum ada tenaga pendidik berlatarbelakang pendidikan luar biasa (PLB). Dari

aspek rencana atau kegiatan, siswa berkebutuhan khusus diintegrasikan ke dalam kelas reguler. SMP Negeri 7 Samarinda menyediakan program bimbingan konseling dan kesempatan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan lomba. Terjalin kerjasama antara guru, pihak sekolah, dan orang tua guna mendukung keberhasilan program inklusi. Secara keseluruhan, SMP Negeri 7 Samarinda telah menunjukkan komitmen terhadap pendidikan inklusi walaupun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang mencakup aspek merinci tugas yang akan dilakukan, membagi tugas, pengelompokan tugas, menetapkan mekanisme organisasi, dan memantau aktivitas struktur organisasi. Dari aspek merinci tugas bahwa SMP Negeri 7 Samarinda pada rincian tugasnya tim inklusi bertugas khusus menangani siswa berkebutuhan khusus. Guru mata pelajaran bertugas memberikan pembelajaran yang sesuai kemampuan setiap siswa. Guru BK berperan dalam memberikan konseling, melakukan asesmen, dan berkoordinasi dengan pihak lain. Sementara itu, koordinator inklusi bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim. Dari aspek membagi tugas, SMP Negeri 7 Samarinda menyusun struktur organisasi yang jelas untuk program inklusi. Setiap anggota tim akan saling melengkapi. Dari aspek pengelompokan tugas, guru mata pelajaran, guru BK, koordinator inklusi, dan kepala sekolah bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi siswa berkebutuhan khusus.

Dari aspek mekanisme organisasi bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek memantau aktivitas struktur organisasi bahwa SMP Negeri 7 Samarinda melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan siswa dan kinerja tim inklusi. Hasil pemantauan digunakan untuk mengevaluasi program dan melakukan perbaikan untuk kedepannya. Kepala sekolah berperan penting dalam memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program inklusi. Jadi, SMP Negeri 7 Samarinda telah membangun sistem pengorganisasian yang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan program sekolah inklusi. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, kerjasama yang baik antar anggota tim, serta pemantauan yang teratur, program inklusi di sekolah ini dapat berjalan dengan efektif.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan program pendidikan inklusif di SMP Negeri 7 Samarinda menunjukkan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder, terutama para guru. Motivasi yang tinggi dan dedikasi yang kuat dari para guru menjadi landasan utama dalam pemberian layanan Pendidikan berkualitas untuk semua, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Hal ini tercermin dari kesediaan mereka untuk terus belajar dan mengembangkan diri melalui pelatihan-pelatihan yang relevan. Selain itu, komunikasi yang efektif antara siswa, guru, sekolah, dan orang tua, menjadi kunci dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan saling mendukung, permasalahan dapat segera diidentifikasi dan solusi yang tepat dapat ditemukan. Keterbukaan dalam berkomunikasi ini menciptakan iklim yang positif dan kondusif bagi tumbuh kembang semua siswa.

Faktor lain yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program inklusi di sekolah ini adalah adanya dukungan dari kepala sekolah. Kepala sekolah berperan penting dalam memberikan motivasi, arahan, dan dukungan kepada

para guru dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, kombinasi antara motivasi yang kuat dan komunikasi yang efektif telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda.

4. Pengawasan dan Evaluasi

SMP Negeri 7 Samarinda telah menetapkan standar kinerja yang jelas bagi para guru dan secara rutin melakukan pemantauan terhadap kinerja mereka. Hasil pemantauan kemudian dievaluasi untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Mekanisme evaluasi yang sistematis juga telah diterapkan di sekolah. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap program inklusi secara keseluruhan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai acuan dalam merumuskan strategi perbaikan di masa mendatang. Jadi, secara keseluruhan, SMP Negeri 7 Samarinda telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan sistem evaluasi kinerja. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

E. Pembahasan

Adapun pembahasan mengenai Manajemen Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Pada perencanaan terdapat temuan bahwa tujuan utama program inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda adalah untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam akses pendidikan. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Hildegun Olsen dalam Hayani Wulandari dan Tasya Dila Fatimah, yang menyatakan bahwa pendidikan inklusi bertujuan untuk memfasilitasi seluruh anak tanpa memandang kondisi, intelektual, emosional, sosial, fisik, dan sebagainya (Wulandari & Fatimah, 2023).

Temuan selanjutnya terkait keadaan sekolah bahwa tahap ini, sekolah melakukan asesmen terhadap setiap siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus yang dimiliki. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar untuk menentukan jenis dukungan yang diperlukan oleh setiap siswa. Temuan ini sejalan dengan teori Dewi (2018), yang menyatakan bahwa asesmen anak berkebutuhan khusus merupakan proses sistematis dan komprehensif untuk menggali permasalahan, hambatan, keunggulan, dan kebutuhan individu. Penelitian ini juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian Julaeha (2021), yang mengidentifikasi bahwa deteksi siswa inklusi melibatkan beberapa tahapan, termasuk asesmen/penilaian untuk mengelompokkan jenis kemampuan yang dimiliki siswa. Temuan ini juga sejalan dengan teori manajemen kesiswaan dalam pendidikan inklusi yang menyatakan bahwa asesmen penting dalam penerimaan siswa untuk mengidentifikasi, menilai, dan menempatkan mereka sesuai kebutuhan (Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Selanjutnya terdapat temuan dari segi pendukung dan hambatan bahwa sekolah telah mengidentifikasi sejumlah hambatan dalam pelaksanaan program inklusi, antara lain kurangnya infrastruktur khusus yang memadai, serta keterbatasan kompetensi guru berlatarbelakang Pendidikan Luar Biasa (PLB). Hambatan ini sejalan dengan temuan dari Ainul Mardiah, yang juga mengungkapkan bahwa kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai merupakan hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif (Mardiah, 2024).

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Siregar (2022) yang menemukan kendala serupa dalam menyediakan sarana bagi ABK karena keterbatasan dana. Hambatan ini juga sejalan dengan teori manajemen sarana dan prasarana, yang mencakup tanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pengorganisasian, dan pengawasan fasilitas untuk mendukung pembelajaran inklusif secara optimal. Dengan demikian, temuan penelitian ini mendukung pentingnya manajemen sarana dan prasarana yang lebih baik untuk memastikan keberhasilan implementasi pendidikan inklusi di sekolah (Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). Namun, sekolah juga melihat adanya sejumlah pendukung, seperti dukungan dari pemerintah, orang tua, dan komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan Pratiwi (2019), yang mengidentifikasi bahwa dukungan dari orang tua, guru, dan anak didik merupakan faktor utama dalam mendukung pendidikan inklusif. Temuan ini juga sejalan dengan teori manajemen lingkungan dalam pendidikan inklusif, yang menekankan bahwa pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah (Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Pada temuan keempat menyangkut rencana bahwa sekolah telah merumuskan berbagai rencana kegiatan untuk mencapai tujuan program inklusi, seperti integrasi siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler, pemberian dukungan individual, dan kesempatan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan lomba. Sapon-Shevin dalam Jauhari (2017) menyatakan bahwa pendidikan inklusi mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah terdekat dan belajar bersama teman-teman seusianya di kelas reguler. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Junaidi (2024), yang menemukan bahwa pelaksanaan kurikulum inklusi dalam mengembangkan kompetensi siswa juga melibatkan integrasi kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, sejalan juga dengan penelitian terdahulu oleh Amelya & Roesminingsih (2023) menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari strategi manajemen pendidikan inklusi untuk mendukung keterlibatan siswa berkebutuhan khusus. Penelitian Anggara (2023) juga menekankan penempatan PDBK dalam kelas reguler dan mengikutsertakan siswa berkebutuhan khusus dalam berbagai lomba sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan perkembangan mereka. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya yang menekankan pentingnya kegiatan ekstrakurikuler dan lomba sebagai sarana untuk mengembangkan potensi siswa dalam program inklusi. Teori perencanaan yang dikemukakan oleh Handoko dalam Yasmita et al. (2022) menyebutkan bahwa tahapan perencanaan yaitu mencakup proses menetapkan tujuan, menjelaskan keadaan, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, penetapan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa program inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam akses pendidikan bagi semua siswa, sesuai dengan prinsip pendidikan inklusi yang mengakomodasi berbagai kondisi. Penelitian menemukan bahwa sekolah telah melakukan asesmen menyeluruh terhadap siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus mereka, yang penting dalam proses penerimaan dan penempatan siswa sesuai dengan kebutuhan individu. Meskipun ada permasalahan seperti kurangnya infrastruktur serta keterbatasan kompetensi guru berlatarbelakang PLB. Dukungan dari pemerintah, orang tua, dan komunitas turut berperan dalam keberhasilan program. Selain itu,

rencana kegiatan yang telah disusun oleh sekolah mencakup integrasi siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler dan kesempatan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan lomba, yang sejalan dengan teori-teori manajemen pendidikan. Temuan ini menegaskan pentingnya perencanaan, pengelolaan sarana prasarana, dan dukungan komunitas untuk keberhasilan implementasi pendidikan inklusi.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada pengorganisasian terdapat poin temuan dari segi perincian tugas bahwa SMP Negeri 7 Samarinda telah melakukan perincian tugas dalam pelaksanaan program inklusi. Setiap anggota tim memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini sejalan dengan teori dari Istanto, dkk (2022), yang menyatakan bahwa tim yang efektif harus memiliki kejelasan peran dan tugas kerja, di mana setiap anggota memahami tugasnya dengan jelas sehingga pelaksanaan tugas dapat dipertanggungjawabkan dan distribusi pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Temuan ini juga sejalan dengan teori manajemen tenaga kependidikan, yang menekankan bahwa perincian tugas yang jelas merupakan komponen kunci dalam pengelolaan sumber daya manusia (Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Selanjutnya terdapat temuan dari segi pembagian tugas bahwa pembagian tugas dalam program inklusi di sekolah ini juga telah dilakukan. Setiap anggota tim memiliki tugas yang spesifik dan saling melengkapi. Pembagian tugas yang jelas ini membantu menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini sejalan dengan teori Yoky dalam (Istanto et al., 2022), yang menyatakan bahwa pembagian tugas dalam organisasi, termasuk di sekolah, penting untuk memastikan interaksi yang baik antar anggota, dan kepala sekolah harus dengan tegas menetapkan tugas setiap anggota. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen tenaga kependidikan, di mana tugas yang spesifik dan saling melengkapi antar anggota tim mendukung kolaborasi yang efektif.

Temuan selanjutnya ialah dari segi pengelompokan tugas bahwa sekolah telah melakukan pengelompokan tugas berdasarkan fungsi dan tanggung jawab antara guru mata pelajaran, guru BK dan tim inklusi. Dakhi (2016) menyatakan bahwa salah satu aspek utama dari pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan ke dalam departemen atau subdivisi. Hal ini juga sejalan dengan teori manajemen tenaga kependidikan yang menekankan pentingnya distribusi tanggung jawab berdasarkan keahlian masing-masing (Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Temuan selanjutnya ialah dari segi mekanisme organisasi bahwa sekolah telah menetapkan mekanisme organisasi yang jelas untuk program inklusi. Hal ini terlihat dari adanya SK kepala sekolah yang menunjuk guru-guru sebagai tim inklusi. Tim ini memiliki struktur organisasi yang jelas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program inklusi. Selain itu, sekolah juga mengikuti regulasi pemerintah yang berlaku terkait dengan pendidikan inklusi. Hal ini sejalan dengan teori Wahyudi, dkk. (2024) bahwa struktur organisasi yang jelas dengan peran dan tanggungjawab jelas akan menjadikan organisasi yang efektif. Hal ini juga sejalan dengan prinsip manajemen tenaga kependidikan yang menekankan pentingnya struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik (Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Pada temuan kelima menyangkut pemantauan organisasi bahwa sekolah secara rutin melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program inklusi. Hal ini dilakukan melalui rapat-rapat tim inklusi untuk membahas perkembangan siswa, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah perbaikan. Kepala sekolah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja tim inklusi. Hal ini sejalan dengan pendapat Payamta & Setyaningsih (2024), yang menekankan pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi internal yang berkualitas dalam mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip manajemen tenaga kependidikan yang menekankan pentingnya evaluasi dan umpan balik dalam pengelolaan kinerja (Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). Hal tersebut sesuai dengan teori pengorganisasian yang dikemukakan oleh Stoner dalam (Yasmita et al., 2022) bahwa tahapan pengorganisasian yaitu merinci tugas yang akan dilakukan, membagi tugas, pengelompokan tugas, menetapkan mekanisme organisasi dan memantau aktivitas struktur organisasi.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 7 Samarinda telah menerapkan pengorganisasian yang efektif dalam pelaksanaan program inklusi dengan merinci, membagi, dan mengelompokkan tugas secara jelas antara anggota tim. Kejelasan peran dan tanggung jawab ini mendukung pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan, menghindari tumpang tindih, dan memastikan perhatian yang memadai bagi setiap siswa. Mekanisme organisasi yang ditetapkan, termasuk penunjukan tim inklusi dan pemantauan rutin melalui rapat dan evaluasi kinerja, menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah serta prinsip-prinsip manajemen tenaga kependidikan. Temuan ini sejalan dengan teori-teori manajemen tenaga kependidikan dan pengorganisasian yang menekankan pentingnya struktur, distribusi tanggung jawab, dan sistem pemantauan dalam mencapai hasil yang diinginkan dalam pendidikan inklusi.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pada pelaksanaan terdapat poin temuan yaitu dari segi memotivasi bahwa salah satu kunci keberhasilan program inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda adalah motivasi yang tinggi dari para guru. Hal ini selaras dengan pendapat Rahman, dkk (2023), yang menekankan pentingnya motivasi dalam menjaga semangat kerja para guru dan staf sekolah. Motivasi guru juga ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Dengan demikian, guru-guru merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi siswa-siswanya. Efendi & Sholeh (2023) menyatakan bahwa melalui pelatihan yang efektif, guru dapat terus meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kualitas pengajaran mereka. Pentingnya pengembangan profesional guru melalui pelatihan untuk meningkatkan (Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Selanjutnya terdapat temuan dari segi komunikasi bahwa komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program inklusi. SMP Negeri 7 Samarinda telah membangun saluran komunikasi yang terbuka antara kepala sekolah, guru, dan tim inklusi. Komunikasi yang baik membantu kelancaran organisasi, dan bahwa komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dari setiap organisasi (Effendy et al., 2023). Pelaksanaan atau

pengarahan yaitu mencakup kegiatan memotivasi bawahan dan memiliki komunikasi yang baik (Yasmita et al., 2022).

Keberhasilan program inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda dipengaruhi oleh motivasi tinggi para guru dan komunikasi yang efektif di antara semua pihak terkait. Motivasi guru yang ditingkatkan melalui pelatihan memperkuat kepercayaan diri mereka dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, sejalan dengan teori yang menekankan pentingnya pengembangan profesional untuk meningkatkan kompetensi pengajaran. Selain itu, saluran komunikasi yang terbuka antara kepala sekolah, guru, dan tim inklusi berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan program, menciptakan lingkungan kerja yang kooperatif dan produktif. Temuan ini mendukung teori pelaksanaan yang menyoroti pentingnya motivasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan organisasi.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pada pengawasan terdapat poin temuan yaitu dari segi standar kinerja bahwa SMP Negeri 7 Samarinda telah menetapkan standar kinerja yang cukup jelas bagi para guru, terutama terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pengajaran. Standar kinerja ini mengacu pada visi dan misi sekolah serta peraturan yang berlaku. Standar kinerja memberikan landasan objektif untuk mengevaluasi apakah kinerja seorang guru telah memenuhi atau melampaui harapan yang ditetapkan, serta menjadi acuan pertanggungjawaban terhadap kualitas pekerjaan (Yuliana & Sholeha, 2024). Temuan ini juga sejalan dengan teori manajemen tenaga kependidikan, yang menyatakan bahwa penetapan standar kinerja bagi guru adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di sekolah (Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Temuan selanjutnya dari segi pemantauan kinerja bahwa sekolah telah memiliki mekanisme pemantauan kinerja yang cukup baik. Adanya wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam bidang kurikulum dan kesiswaan menunjukkan adanya upaya untuk memantau secara berkala kinerja guru-guru. Pemantauan kinerja guru tidak hanya berfungsi untuk mengevaluasi, tetapi juga memberikan umpan balik yang membangun (Neneng et al., 2024).

Lalu juga ditemukan dari segi membandingkan kinerja dengan standar bahwa sekolah secara rutin membandingkan kinerja guru dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis data kehadiran, jurnal, dan hasil evaluasi pembelajaran. Hasil perbandingan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen kurikulum, yang menyatakan bahwa evaluasi dan analisis kinerja adalah bagian penting dalam pengelolaan kurikulum di sekolah inklusif. Dengan membandingkan kinerja guru terhadap standar, sekolah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam proses pembelajaran, serta mengembangkan strategi perbaikan yang lebih efektif untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus (Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Dan yang terakhir temuan yang berkaitan dengan evaluasi bahwa sekolah telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program inklusi. Evaluasi ini dilakukan melalui refleksi bersama antara kepala sekolah, guru, dan tim inklusi. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan program, sehingga dapat dilakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Evaluasi berkelanjutan memastikan perbaikan terus-menerus, dan pembentukan tim inklusi dapat membantu implementasi dan kompetensi mereka

evaluasi program secara efektif (Wandayu et al., 2024). Hal tersebut sesuai dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Stoner dalam Yasmita, dkk. (2022) bahwa tahapan pengawasan yaitu mencakup menetapkan standar kinerja, memantau kinerja, membandingkan kinerja dengan standar kinerja dan mengevaluasi

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 7 Samarinda telah menerapkan sistem pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan program inklusi melalui penetapan standar kinerja yang jelas, mekanisme pemantauan kinerja yang baik, serta evaluasi berkala. Standar kinerja yang berlandaskan visi dan misi sekolah menjadi acuan objektif untuk menilai kinerja guru, yang diikuti oleh pemantauan rutin melalui jurnal dan data kehadiran, memungkinkan umpan balik yang konstruktif. Proses perbandingan kinerja guru dengan standar yang ditetapkan mendukung perbaikan berkelanjutan dalam pengajaran, terutama untuk siswa berkebutuhan khusus. Evaluasi yang dilakukan secara kolaboratif oleh kepala sekolah, guru, dan tim inklusi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program, mendorong perbaikan yang diperlukan. Temuan ini sejalan dengan teori pengawasan yang menekankan pentingnya setiap tahapan dalam proses pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif.

F. Kesimpulan

SMP Negeri 7 Samarinda telah mengimplementasikan pendidikan inklusi melalui berbagai lingkup manajemen. Dalam perencanaan, sekolah melakukan asesmen siswa berkebutuhan khusus untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus siswa, yang mencerminkan adanya manajemen kesiswaan dalam pendidikan inklusi, serta merencanakan dukungan individual dan kesempatan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan lomba, mencerminkan manajemen kurikulum. Hambatan berupa kurangnya sarana prasarana mendukung pelaksanaan program juga ditemukan, yang terkait dengan manajemen sarana prasarana, sementara dukungan dari pemerintah dan orang tua mencerminkan manajemen lingkungan. Pada pengorganisasian, pembagian tugas yang jelas di antara guru dan tim inklusi menunjukkan pelaksanaan manajemen tenaga kependidikan yang efektif, dengan pengelompokan tugas berdasarkan fungsi, memperlihatkan adanya manajemen. Dalam pelaksanaan, motivasi guru yang ditingkatkan melalui pelatihan menunjukkan dalam manajemen tenaga kependidikan, sementara komunikasi yang efektif antara pihak sekolah memperlihatkan penerapan komunikasi yang mendukung. Terakhir, dalam pengawasan dan evaluasi, standar kinerja dan mekanisme pemantauan yang telah ditetapkan memperlihatkan adanya pelaksanaan manajemen kurikulum dan tenaga kependidikan, dengan evaluasi berkala yang melibatkan refleksi bersama menunjukkan manajemen lingkungan dan kinerja yang berkelanjutan.

Manajemen pendidikan inklusi di SMP Negeri 7 Samarinda telah berjalan cukup baik melalui perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, meskipun masih menghadapi kendala sarana prasarana. Oleh karena itu, direkomendasikan agar sekolah memperkuat sistem asesmen dan perencanaan individual, meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, mengoptimalkan penyediaan sarana prasarana yang mendukung inklusi, serta memperkuat kemitraan dengan orang tua dan pemerintah. Selain itu, diperlukan sistem evaluasi berbasis kinerja yang terstruktur dan berkelanjutan guna menjamin kualitas dan keberlangsungan program pendidikan inklusi.

Referensi

- Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 7962–7963.
- Amelya, T. D., & Roesminingsih, E. (2023). Manajemen Pendidikan Inklusif Dalam Mewujudkan Potensi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 47 Surabaya. *Journal of Education and Learning*, 2(1).
- Anggara, D. (2023). Manajemen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) Di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 3 Samarinda. In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Ashari, Y. (2024). *Wali Kota Samarinda Berharap PLDPI Jadi Pusat Layanan Inklusif Dan Berkualitas Bagi ABK*. Niaga.Asia. <https://www.niaga.asia/wali-kota-samarinda-berharap-pldpi-jadi-pusat-layanan-inklusif-dan-berkualitas-bagi-abk/>
- Bahri, S. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), h. 95.
- Dakhi, Y. (2016). Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu. *Jurnal Warta*, 53.
- Dewi, D. P. (2018). Asesmen Sebagai Upaya Tindak Lanjut Kegiatan Identifikasi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *Wahana*, 70(1), h. 18.
- Direktorat PPK-LK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)*.
- Effendy, E., Agni, M., Putri, M. R., & Firdasari, S. (2023). Proses Komunikasi yang Efektivitas Dalam Organisasi. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(3), 1145–1151.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.)). CV. Pustaka Ilmu.
- Undang-undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20, LN.2003/NO.78 (2003).
- Isna Yunita, E., Suneki, S., & Wakhyudin, H. (2019). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Proses Pembelajaran dan Penanganan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *International Journal of Elementary Education*, 3(3), h. 268.
- Istanto, H., Murjani, Arbainsyah, Yani, A., & Karimah, N. N. (2022). Karakteristik Tim yang Efektif untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Jurnal For Islamic Studies*, 5(3), 187–195.
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1), h. 29.

- Julaeha, N. A. (2021). Pengembangan Potensi Diri Siswa Inklusi Melalui Kegiatan Wirausaha Di Sekolah Dasar Islam Bunga Bangsa Samarinda. In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Junaidi, A. (2024). Manajemen Kurikulum Pendidikan Inklusi Dalam Pengembangan Kompetensi Entrepreneurship Siswa Di SMP Negeri 2 Satu Atap Jambon Ponorogo. In *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mardiah, A. (2024). Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 7 Trienggadeng Pidie Jaya. *Journal of Education Sciences and Teacher Training*, 12(01), 145–159.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, (2009).
- Mulyah, S., & Khoiri, Q. (2023). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Journal on Education*, 05(03), h. 8279.
- Neneng, Qomariyah, S., Rizki, N. J., & Erviana, R. (2024). Implementasi Supervisi Manajerial dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Paud Almanshuriyah Kota Sukabumi. *KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(3).
- Nurwahyuliningsih, E., & Ramdani, J. (2024). Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di SMK Negeri Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 5(2), h. 110.
- Payamta, P., & Setyaningsih, T. (2024). Mengukur Kendali dan Keberhasilan : Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. *Jurnal Edukasi Indonesia*, 4(1), 76–86.
- Pratiwi, N. A. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Serang Pengasuh Kulon Progo. *Jurnal Widia Ortodidaktika*, 8(10), h. 1016.
- Rahman, Sirajuddin, Zulkarnain, & Suradi. (2023). Prinsip, Implementasi dan Kompetensi Guru dalam Pendidikan Inklusi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(2), 1075–1082.
- Rakhmatyah, R., Mahmud, M. E., & Asiah, S. N. (2023). Problematika Pembelajaran Sekolah Dasar Inklusi Di Samarinda (Studi Multisitus Di SDN 016, SD Islam Bunga Bangsa Dan SD Fastabiquil Khairat). *ANSIRU PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 7(1), h. 195.
- Ridha, M., & Setyoningrum, M. U. (2022). Manajemen Pembelajaran Daring Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda. *Borneo Journal of Islamic Education*, vol 2 no.1(2), 2022.
- Sherly, Nurmiyanti, L., The, H. Y., Firmadani, F., Safrul, Nuramila, Sonia, N. R., Lasmono, S., Halip, M. F., Hartono, R., Na'im, Z., Lestari, A. S., Kristina, M., Sari, R. N., & Hardianto. (2020). *Manajemen Pendidikan (Tinjauan Teori dan Praktis)*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Siregar, L. J. (2022). Pelayanan Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Di SMKN 3 Samarinda. In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Tamy Deby Ivancha, H., Islamiah, I., Putra, W., & Andriani, O. (2024). Dampak Manajemen Pendidikan Inklusi Yang Diberikan Pada Anak ABK. *JPBB : Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 3(1), h. 39.
- Wahyudi, R., Hariyati, N., & Mariana, N. (2024). Implementasi Manajemen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMPN Kabupaten Magetan. *Journal of Education Research*, 5(3), 3311–3317.
- Wandayu, R., Mahendra, S., & Mustika, D. (2024). Optimalisasi Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi di Sekolah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 1–14.
- Widodo, A., Indraswati, D., Sutisna, D., Nursaptini, & Novitasari, S. (2020). Identifikasi Bakat Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) Di Madrasah Inklusi Kabupaten Lombok. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 3(2), h. 104.
- Wulandari, H., & Fatimah, T. D. (2023). Tantangan Tenaga Pendidik PAUD dalam Proses Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(15), h. 641.
- Yasmita, I., Mahdum, M., & Kartikowati, R. S. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Untuk Siswa Berkebutuhan Khusus Di SDS Cendana Duri. *Jurnal JUMPED (Jurnal Manajemen Pendidikan)*, 10(1), h. 67.
- Yuliana, N., & Sholeha, L. K. (2024). Analisis Kinerja Guru Di SMK Bina Pemuda Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. *Manajemen : Jurnal Ekonomi USI*, 6(1), 176–187.